

## **Analisis Terhadap Disparitas Antar Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan**

**Hukma Ratu Purnama<sup>1\*</sup>, Andika Pramukti Lamo<sup>2</sup>, Ade Putri Lestari<sup>3</sup>, Putri Fidyah Majid<sup>4</sup>**

Universitas Muslim Indonesia, Makassar<sup>1\*,2,3,4</sup>  
hukmaratu.purnama.umi.ac.id

### **ABSTRACT**

*This study examines economic growth and regional disparities in South Sulawesi Province during the 2019–2023 period, focusing on the development of the Human Development Index (HDI). The urgency of this research lies in understanding the factors influencing HDI growth as a primary indicator of societal welfare and quality of life, particularly in efforts to reduce regional disparities. This study employs a descriptive quantitative method, analyzing secondary data obtained from official publications such as the Central Bureau of Statistics and related agencies, to assess HDI growth trends and compare them with the national average. The findings reveal that South Sulawesi's HDI has steadily increased from 73.08 in 2020 to 74.60 in 2023. Generally, the province's HDI achievement is slightly above the national average, which rose from 72.81 in 2020 to 74.39 in 2023. Since 2017, South Sulawesi's human development status has been classified as "high," ranging between 70 and 80. Over the past four years, HDI growth has been within the 0–1 percent range, with significant acceleration in the last two years. In 2021, HDI grew by 0.41 percent, followed by faster growth of 0.79 percent in 2022, and reaching 0.87 percent in 2023, with an increase of 0.64 points compared to the previous year.*

**Keywords:** Economic Growth; Human Development Index (HDI); National Average Comparison; Regional Development; Regional Disparities

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas pertumbuhan ekonomi dan disparitas antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019–2023, dengan fokus pada perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Urgensi penelitian ini didasari oleh pentingnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan IPM sebagai indikator utama kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi, seperti Badan Pusat Statistik dan instansi terkait, untuk mengukur tren pertumbuhan IPM serta membandingkannya dengan rata-rata nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan, dari 73,08 pada tahun 2020 menjadi 74,60 pada tahun 2023. Secara umum, pencapaian IPM Sulawesi Selatan berada sedikit di atas rata-rata nasional, di mana IPM nasional meningkat dari 72,81 pada tahun 2020 menjadi 74,39 pada tahun 2023. Sejak tahun 2017, status pembangunan manusia di Sulawesi Selatan telah mencapai level "tinggi" (kisaran 70–80). Pertumbuhan IPM dalam empat tahun terakhir berada pada kisaran 0–1 persen, dengan percepatan signifikan selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, IPM tumbuh sebesar 0,41 persen, diikuti pertumbuhan lebih cepat sebesar 0,79 persen pada tahun 2022, dan mencapai 0,87 persen pada tahun 2023 dengan peningkatan 0,64 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

**Kata kunci:** Pertumbuhan Ekonomi; Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Perbandingan Rata-rata Nasional; Pembangunan Wilayah; Disparitas Wilayah

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur, perilaku, dan institusi sosial. Selain itu, pembangunan juga mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan. Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapainya, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Namun, pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa diimbangi pemerataan hanya akan memperbesar ketimpangan antarwilayah. Ketimpangan ini terlihat dari fenomena adanya wilayah yang maju di satu sisi dan wilayah yang kurang berkembang di sisi lain.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan masalah umum yang terjadi dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Hal ini umumnya disebabkan oleh perbedaan dalam kandungan sumber daya alam, kondisi geografis, serta kemampuan daerah dalam menjalankan proses pembangunan. Sebagai akibatnya, dalam setiap wilayah biasanya terdapat daerah yang lebih maju (*Development Region*) dan daerah yang tertinggal (*Underdevelopment Region*). Ketimpangan ini berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah, sehingga menjadi perhatian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah (Safitri, Junaidi, & Erfit, 2021).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai representasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi dijadikan indikator utama untuk mengukur kesejahteraan, yang berkaitan dengan peningkatan *output* per kapita suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi regional dapat diukur menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan serta data pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah bersangkutan. Jika PDRB tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, maka dapat diasumsikan bahwa wilayah tersebut mengalami peningkatan kesejahteraan (Sudirman & Mahadi, 2021).

Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap masih belum cukup. Pemerintah juga harus memperhatikan pemerataan pendapatan di masyarakat. Pertumbuhan yang tidak merata hanya akan memberikan manfaat kepada kelompok tertentu dan meninggalkan masalah kemiskinan. Untuk mengatasi ini, program pembangunan ekonomi yang merata sangat dibutuhkan, termasuk melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan pemberdayaan masyarakat secara seimbang antarwilayah. Infrastruktur merupakan motor penggerak utama aktivitas ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan.

Sulawesi Selatan, sebagai salah satu provinsi di Koridor Pembangunan Sulawesi, mengalami ketimpangan pembangunan antarwilayah. Fenomena ini dapat diukur dengan menggunakan indeks Williamson untuk menentukan tingkat disparitas antar kabupaten/kota (Asrahmaulyana, 2023). Ketimpangan yang terjadi berkontribusi terhadap perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah, khususnya di Sulawesi Selatan (Sulistya & Budirahayu, 2019). Lebih lanjut, Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi tantangan besar dalam mengatasi disparitas distribusi pendapatan antar kabupaten/kota. Berdasarkan penelitian sebelumnya, faktor-faktor seperti partisipasi angkatan kerja, pengeluaran per kapita, kedalaman kemiskinan, pendidikan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memengaruhi ketimpangan tersebut (Amaliyah & Arif, 2023). Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Koridor Pembangunan Sulawesi yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Pada tahun 2017, Sulawesi Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,23%, tertinggi kedua secara nasional. Keberhasilan ini banyak dipengaruhi oleh pembangunan di Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan. Namun, kabupaten/kota lain memberikan kontribusi yang lebih rendah, sehingga menyebabkan tingginya rasio gini sebesar 0,429—tertinggi secara nasional pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antarwilayah di Sulawesi Selatan yang semakin tajam.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah sering kali disebabkan oleh perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Daerah yang memiliki sumber daya lebih banyak, terutama barang modal (*capital stock*), akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 24 kabupaten/kota, ketimpangan ini juga terjadi. Disparitas antarwilayah dapat diukur menggunakan Indeks Williamson (Asrahmaulyana, 2023. *Determinan Disparitas Antar Wilayah Dikaitkan dengan Pertumbuhan Ekonomi. Economics and Digital Business Review. Volume 4 Issue 1*). Secara geografis, disparitas pembangunan di Sulawesi Selatan disebabkan oleh perbedaan potensi ekonomi di setiap daerah. Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah perlu mengutamakan potensi lokal setiap wilayah sehingga mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi. Kegiatan pembangunan yang tepat sasaran dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antarwilayah dan memberikan manfaat yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dampak tingkat partisipasi angkatan kerja, pengeluaran per kapita, indeks kedalaman kemiskinan, pendidikan, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap disparitas distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2017–2021.

## TINJAUAN LITERATUR

### a. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk kemitraan

antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong perkembangan ekonomi di wilayah tersebut (Arsyad, 2010). Perencanaan pembangunan ekonomi daerah dapat dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia dan meningkatkan kapasitas sektor swasta dalam mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Secara tradisional, pembangunan ekonomi berarti peningkatan yang berkelanjutan pada Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Sedangkan untuk daerah, makna pembangunan tersebut difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota.

#### **b. Pertumbuhan Ekonomi,**

Pertumbuhan ekonomi, atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Economic Growth*, merupakan proses kenaikan *output* per kapita yang dimiliki suatu negara dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun. Tolak ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi ini adalah GNP (*Gross National Product*) dan GDP (*Gross Domestic Product*). Kedua indikator ini membantu perhitungan total *output* perekonomian suatu negara. Jika GNP mengukur *output* produksi perekonomian nasional yang dimiliki oleh warga negara baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, maka GDP hanya mengukur *output* produksi yang ada di dalam negeri, tanpa memperhatikan apakah produksi tersebut dihasilkan oleh orang asing atau bukan. Dengan kata lain, GDP berfokus pada lokasi, yakni domestik atau dalam negeri. Ada empat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (Suryana, 2000). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya.

#### **c. Disparitas Wilayah,**

Disparitas atau ketimpangan merupakan perbedaan dalam pembangunan ekonomi antarwilayah, baik secara vertikal maupun horizontal, yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan. Disparitas ini timbul akibat kurangnya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Ketidakmerataan ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Hal ini dapat terlihat jelas dari fenomena adanya wilayah yang maju di satu sisi dan wilayah yang terbelakang atau kurang maju di sisi lainnya.

#### **d. Disparitas Antar Wilayah,**

Disparitas antarwilayah mengacu pada perbedaan dalam pembangunan ekonomi dan pencapaian ekonomi yang tidak merata secara geografis. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti pendapatan per kapita, proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase penduduk perkotaan, dan kelengkapan infrastruktur wilayah. Disparitas antarwilayah disebabkan oleh faktor fisiografis dan sosial-ekonomi wilayah. Faktor fisiografis meliputi: ketersediaan lahan untuk pembangunan, kesuburan tanah, sumber daya alam, dan potensi bencana alam

yang dapat mempengaruhi perkembangan wilayah. Sedangkan faktor sosial-ekonomi mencakup: sumber daya finansial, akses teknologi, pelayanan publik, budaya masyarakat, tata kelola pemerintahan, kebijakan pembangunan, serta superioritas politik dan ekonomi yang dimiliki suatu wilayah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar dengan mengambil data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. Waktu yang dibutuhkan untuk seluruh rangkaian penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, adalah selama enam bulan. Untuk jenis dan sumber data, penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yang merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, dan disajikan dalam bentuk angka atau bilangan.

Penelitian ini menggunakan **Analisis Deskriptif Kualitatif** untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas data yang dikumpulkan melalui wawancara atau pengamatan. **Indeks Williamson** digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kesenjangan pembangunan antar wilayah. Indeks ini membandingkan tingkat pembangunan suatu wilayah dengan wilayah lain yang lebih maju. Selain itu, **Analisis Tipologi Klassen** digunakan melalui dua pendekatan: pertama, pendekatan sektoral yang mengelompokkan sektor-sektor berdasarkan pertumbuhan dan kontribusi mereka terhadap total PDRB kabupaten/kota; kedua, pendekatan wilayah yang didasarkan pada dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau PDRB per kapita daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskriptif Penelitian**

#### **a. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator penunjuk adanya pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil diharapkan berperan dalam meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi sehingga merangsang bagi berkembangnya ekonomi dalam skala yang lebih besar, serta berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui besarnya perubahan statistik pendapatan regional, atau yang lebih dikenal dengan produk domestik regional bruto (PDRB), dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan besarnya kenaikan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang terbentuk pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang dihitung berdasarkan besarnya kenaikan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang terbentuk pada tahun sebelumnya. Nilai PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan nilai semua barang dan jasa dengan harga tahun tertentu.

**Tabel 1. PDRB Per Kapita atas Harga Konstan 2010 dan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan 2019 - 2023 (persen)**

No	Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kep. Selayar	27.446	26.463	27.255	27.953	28.669
2	Bulukumba	20.466	19.695	20.430	20.989	21.632
3	Bantaeng	29.986	28.775	30.989	35.361	36.904
4	Jeneponto	18.379	16.725	17.418	17.877	18.014
5	Takalar	22.422	21.897	22.711	23.429	23.999
6	Gowa	18.100	18.370	19.405	19.964	20.784
7	Sinjai	29.139	27.810	28.953	30.026	31.396
8	Maros	39.034	31.358	31.292	33.652	34.835
9	Pangkep	51.421	49.025	50.216	52.161	54.095
10	Barru	27.577	26.280	27.350	28.548	29.349
11	Bone	29.333	27.557	28.771	30.014	30.879
12	Soppeng	30.581	30.400	32.150	33.968	34.934
13	Wajo	31.961	33.525	35.596	36.184	36.454
14	Sidrap	28.278	26.337	27.521	28.601	29.281
15	Pinrang	33.892	31.831	32.976	34.019	34.314
16	Enrekang	21.923	20.461	21.452	21.916	22.097
17	Luwu	26.746	26.997	28.291	29.506	30.763
18	Tana Toraja	19.293	16.269	16.868	17.545	17.998
19	Luwu Utara	26.244	25.359	26.048	26.909	27.956
20	Luwu Timur	54.446	55.007	53.430	53.728	58.109
21	Toraja Utara	22.003	19.793	20.259	20.974	21.444
22	Makassar	80.512	84.967	88.058	92.141	96.359
23	Parepare	34.254	32.743	33.656	35.074	35.858
24	Palopo	30.030	29.767	30.864	32.157	33.044
No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kep. Selayar	7.68	-1.78	4.02	3.67	3.68
2	Bulukumba	5.49	0.43	4.76	3.81	4.11
3	Bantaeng	10.75	0.52	8.86	15.45	5.56
4	Jeneponto	5.47	0.16	5.40	3.81	1.90
5	Takalar	6.87	-0.61	5.05	4.64	3.86
6	Gowa	7.46	1.76	7.26	4.59	5.82
7	Sinjai	6.12	1.55	5.23	4.87	5.71
8	Maros	1.24	-10.87	1.36	9.13	5.00
9	Pangkep	6.41	-1.69	3.46	4.93	4.75
10	Barru	7.41	0.87	4.77	5.11	3.51

11	Bone	7.01	-0.25	5.53	5.23	3.77
12	Soppeng	7.69	2.19	6.15	6.18	3.33
13	Wajo	4.06	-1.17	6.77	2.38	1.43
14	Sidrap	4.65	-0.59	5.54	4.86	3.28
15	Pinrang	6.53	0.44	5.04	4.53	2.18
16	Enrekang	5.43	1.25	6.36	3.71	2.33
17	Luwu	6.26	1.30	6.03	5.69	5.64
18	Tana Toraja	7.22	-0.28	5.19	5.12	3.66
19	Luwu Utara	7.11	-0.59	3.90	4.54	5.12
20	Luwu Timur	1.17	1.46	-1.39	1.99	9.66
21	Toraja Utara	7.56	0.17	4.05	5.27	3.94
22	Makassar	8.79	-1.27	4.47	5.40	5.31
23	Parepare	6.65	-0.08	4.41	5.93	3.88
24	Palopo	6.75	0.45	5.41	5.83	4.34

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa PDRB di tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten Luwu Timur, meskipun bukan ibu kota provinsi, mencatatkan kontribusi PDRB terbesar di Sulawesi Selatan dengan persentase sekitar 9,66%, diikuti oleh Kabupaten Gowa (5,82%), Kabupaten Sinjai (5,71%), Kabupaten Luwu (5,64%), Kabupaten Bantaeng (5,56%), dan Kota Makassar (5,31%).

Kabupaten Luwu Timur menjadi pilar utama perekonomian Sulawesi Selatan dengan kontribusi sebesar 9,66%. Gejolak perekonomian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 menyebabkan Kota Makassar mengalami kontraksi sebesar 1,46% pada tahun 2020, yang turut mempengaruhi perekonomian Sulawesi Selatan secara keseluruhan.

Dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2023, seluruh kabupaten/kota (24 dari 24) mengalami pertumbuhan positif. Kabupaten Luwu Timur mencatatkan pertumbuhan tertinggi dengan angka 9,66%. Peningkatan signifikan ini didorong oleh sektor penggalian dan pertambangan yang tumbuh lebih dari 16,74%, menjadi faktor utama penyebab pertumbuhan tersebut.

Capaian indikator makro di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan hasil yang luar biasa, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 9,66% pada tahun 2023, dibandingkan dengan 1,99% pada tahun 2022. Ini mencerminkan kenaikan signifikan sebesar 8% dalam laju pertumbuhan ekonomi.

#### **b. Disparitas Wilayah**

Pembangunan manusia yang terus bergulir hingga saat ini masih menyisakan ketimpangan antarwilayah. Ditandai dengan status pembangunan manusia yang berbeda. Ada daerah yang masih berstatus sedang sedangkan yang lain sudah berstatus tinggi bahkan 3 Kotamadya di Sulawesi Selatan telah berstatus sangat

tinggi. Kondisi wilayah, sosial, dan budaya yang berbeda menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan manusia.

Pada empat tahun terakhir, perkembangan IPM Sulawesi Selatan terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 IPM Sulawesi Selatan mencapai 73,08 dan meningkat menjadi 74,60 di tahun 2023. Secara umum pencapaian IPM Sulawesi Selatan sedikit lebih tinggi di atas rata-rata nasional dimana IPM nasional sebesar 72,81 pada tahun 2020 menjadi 74,39 pada tahun 2023. Meski demikian, sejak tahun 2017 status pembangunan manusia di Sulawesi Selatan berhasil naik kelas ke level "tinggi" yaitu berada di kisaran 70 - 80.

**Tabel. 2 Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2019 -2023**

No	Kabupaten/Kota	IPM				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kep. Selayar	66,91	69,29	69,68	70,27	71,13
2	Bulukumba	68,28	71,37	72,02	72,75	73,64
3	Bantaeng	68,30	69,45	69,71	70,41	71,28
4	Jeneponto	64,00	67,22	67,54	68,13	68,95
5	Takalar	66,94	69,84	70,25	70,86	71,46
6	Gowa	69,66	71,58	71,74	72,44	73,01
7	Sinjai	67,05	69,86	70,02	70,60	71,20
8	Maros	69,50	71,77	72,32	72,92	73,56
9	Pangkep	68,29	71,31	71,81	72,41	73,23
10	Barru	70,60	72,43	72,56	72,96	73,80
11	Bone	65,67	68,46	68,81	69,43	70,25
12	Soppeng	68,26	70,01	70,33	71,05	71,94
13	Wajo	69,05	71,57	72,05	72,69	73,56
14	Sidrap	71,05	73,07	73,39	73,81	74,38
15	Pinrang	71,12	73,27	73,46	73,90	74,70
16	Enrekang	72,26	73,98	74,13	74,61	75,11
17	Luwu	70,36	71,58	71,92	72,42	73,23
18	Tana Toraja	68,25	69,05	69,78	70,16	71,01
19	Luwu Utara	69,46	71,53	71,99	72,48	73,31
20	Luwu Timur	72,80	74,71	74,83	75,41	75,84
21	Toraja Utara	69,23	69,80	70,22	70,83	71,69
22	Makassar	82,25	83,58	84,00	84,45	84,85
23	Parepare	77,62	79,20	79,56	79,87	80,36
24	Palopo	77,98	79,39	79,72	80,24	80,77

Disparitas pencapaian pembangunan manusia terjadi antar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023 terdapat 3 Kota yang masuk kategori IPM "sangat tinggi" yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo dengan capaian IPM

masing-masing sebesar 84,85; 80,77 dan 80,36. Hal ini karena pada tahun 2023 level capaian pembangunan manusia di Kota Parepare meningkat dari "Tinggi" menjadi "Sangat Tinggi" dibandingkan tahun 2022. Sementara itu terdapat 1 kabupaten yang masih termasuk kategori IPM "Sedang" yaitu Kabupaten Jeneponto dengan capaian IPM sebesar 68,95. Peningkatan level capaian pembangunan manusia di Bone dari "sedang" menjadi "tinggi" menjadikan saat ini ada 20 Kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki IPM "Tinggi" dengan capaian berada pada kisaran 70,25 hingga 75,84.

### c. Analisis Ketimpangan Wilayah

Sulawesi Selatan memiliki 21 kabupaten dan 3 Kotamadya dan diantara 24 kabupaten/kota beberapa diantaranya mengalami permasalahan mulai dari aspek pembangunan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya alam serta masalah ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk mengetahui ketimpangan wilayah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Williamson. Indeks Williamson memiliki keunggulan dalam mengukur ketimpangan (disparitas) antar subwilayah,

**Tabel 3. Indeks Ketimpangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Indeks Williamson	Perubahan
1.	2019	0,724	-
2.	2020	5,40	1,01
3.	2021	6,41	1,03
4.	2022	5,38	-1,03
5.	2023	5,47	0,09

Nilai indeks Williamson Sulawesi Selatan selama 5 tahun, tahun 2019-2023 memiliki indeks lebih dari nol dan menunjukkan adanya ketimpangan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Jika melihat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menghilangkan 3 kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan angka Nilai Indeks Williamson pada tahun 2019-2023 yakni 0,09 dan Nilai Perubahannya ada yang mengalami penurunan dan penambahan. Sedangkan Nilai Indeks Williamson pada tahun 2023 yakni 0,09 dan Nilai Perubahannya yaitu -0,01.

### d. Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah yang berada di Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis Tipologi Klassen merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing suatu wilayah (Sjafrizal, 2008;180). Tipologi Klassen pada dasarnya membagi wilayah berdasarkan indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah: **(1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), (2) daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), (3) daerah berkembang cepat (*high***

*growth but low income*) dan (4) daerah relatif tertinggal (*low growth but low income*)

**Tabel 4. Klasifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 Menurut Kriteria Tipologi Daerah Berdasarkan Tipologi Klassen**

<b>Kuadran I (Daerah Maju dan Tumbuh Cepat)</b>  Kota Makassar dan Kota Parepare	<b>Kuadran II (Daerah Maju Tapi Tertekan)</b>  Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bulukumba dan Kota Palopo
<b>Kuadran III (Daerah Berkembang Cepat)</b>  Kabupaten Bone, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara	<b>Kuadran IV (Daerah Relatif Tertinggal)</b>  Kabupaten Selayar, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pinrang

Analisis hipotetik berdasarkan data yang dapat diakses untuk tahun 2024:

1) **Kawasan Maju:**

- **Makassar:** Sebagai ibu kota provinsi, Makassar adalah pusat ekonomi utama dengan PDRB tinggi, infrastruktur yang sangat baik, dan tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Makassar juga memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lengkap.
- **Parepare:** Parepare menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan PDRB yang meningkat, pengembangan infrastruktur yang signifikan, serta pengurangan tingkat kemiskinan.

2) **Kawasan Berkembang:**

- **Gowa:** Gowa menunjukkan kemajuan dengan PDRB yang meningkat dan investasi dalam infrastruktur. Meskipun kemiskinan masih ada, penurunan signifikan telah terjadi.
- **Sinjai:** Sinjai memiliki PDRB yang lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten lainnya, dengan infrastruktur yang sedang dalam fase pengembangan dan upaya peningkatan sosial yang terus dilakukan.

3) **Kawasan Terbelakang:**

- **Bone:** Bone mengalami tantangan dalam hal PDRB yang lebih rendah dan pengembangan infrastruktur yang terbatas. Meskipun ada kemajuan, kemiskinan masih menjadi masalah yang signifikan.

- **Wajo:** Wajo menghadapi tantangan serupa dengan PDRB yang lebih rendah dan kebutuhan akan peningkatan infrastruktur dan sosial yang signifikan.
- 4) **Kawasan Tertinggal:**
- **Luwu Utara:** Luwu Utara memiliki PDRB yang rendah dan keterbatasan dalam hal infrastruktur dan fasilitas dasar. Tingkat kemiskinan juga relatif tinggi.
  - **Luwu Timur:** Luwu Timur, meskipun terdapat beberapa upaya pengembangan, masih menghadapi tantangan besar dengan infrastruktur yang kurang memadai dan kondisi ekonomi yang lemah

### **Disparitas Antar Wilayah**

Dari hasil analisis disparitas antar wilayah yang tercermin dari **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** dan **PDRB per kapita**, terdapat ketimpangan pembangunan yang signifikan antara kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Sebagai contoh, Kota Makassar memiliki PDRB per kapita tertinggi pada tahun 2023 sebesar **96.359**, sedangkan Kabupaten Jeneponto tercatat hanya **18.014**. Ini menciptakan disparitas yang mencolok dalam hal pendapatan per kapita antar wilayah.

Data ini sejalan dengan analisis disparitas IPM yang menunjukkan selisih besar antara Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto. Kota Makassar, sebagai pusat ekonomi, memiliki IPM sebesar **84,85** pada tahun 2023, sedangkan Kabupaten Jeneponto hanya mencapai **68,95**, dengan selisih sekitar **15,90** poin. Ini mencerminkan ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup di kedua wilayah tersebut. Selain itu, komponen pengeluaran per kapita di Kota Makassar jauh lebih tinggi, yang menunjukkan perbedaan dalam tingkat kesejahteraan yang mendalam antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Disparitas ini juga tercermin dalam indikator lain seperti **rata-rata lama sekolah** dan **akses terhadap fasilitas pendidikan**, di mana Kabupaten Jeneponto memiliki angka yang lebih rendah dibandingkan Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di kabupaten/kota yang lebih terbelakang, seperti Jeneponto, memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akses terhadap layanan dasar lainnya.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

**PDRB per kapita** dan **laju pertumbuhan ekonomi** menjadi indikator utama dalam mengukur perkembangan ekonomi di Sulawesi Selatan. Secara keseluruhan, meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang positif di hampir semua kabupaten/kota, kontribusi PDRB dari beberapa daerah tetap menunjukkan ketimpangan.

Sebagai contoh, **Kabupaten Luwu Timur** mengalami lonjakan kontribusi PDRB yang sangat signifikan pada tahun 2023 dengan **kontribusi sebesar 9,66%**, meskipun wilayah ini tidak termasuk dalam ibu kota provinsi. Peningkatan ini didorong oleh sektor **pertambangan dan penggalan**, yang mencatatkan

pertumbuhan lebih dari **16,74%**. Meskipun Luwu Timur mencatatkan kontribusi terbesar terhadap PDRB Sulawesi Selatan, wilayah lainnya, seperti **Kota Makassar** dan **Kabupaten Gowa**, menunjukkan kontribusi yang lebih rendah meskipun tetap stabil.

Dalam hal **laju pertumbuhan ekonomi**, beberapa daerah menunjukkan hasil yang variatif. **Kabupaten Luwu Timur**, dengan sektor penggalan yang berkembang pesat, tercatat memiliki **laju pertumbuhan ekonomi tertinggi** pada tahun 2023, yaitu **9,66%**, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Sebaliknya, **Kota Makassar** yang menjadi pusat ekonomi utama di provinsi ini hanya mencatatkan **laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31%** pada tahun yang sama, meskipun memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa **laju pertumbuhan ekonomi** di beberapa daerah, seperti **Maros, Jeneponto, dan Wajo**, mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, tetapi secara bertahap menunjukkan pemulihan di tahun-tahun berikutnya. Di sisi lain, beberapa kabupaten, seperti **Bantaeng** dan **Sinjai**, menunjukkan pertumbuhan yang stabil meskipun tidak mencatatkan lonjakan signifikan pada PDRB per kapita.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2019-2023, pertumbuhan ekonomi dan disparitas antarwilayah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selama empat tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, IPM Sulawesi Selatan tercatat sebesar 73,08 dan meningkat menjadi 74,60 pada tahun 2023. Secara umum, pencapaian IPM Sulawesi Selatan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, yang pada tahun 2020 berada di angka 72,81 dan meningkat menjadi 74,39 pada tahun 2023.

Meskipun demikian, sejak tahun 2017, status pembangunan manusia di Sulawesi Selatan berhasil naik ke kategori “tinggi”, dengan IPM yang berada di kisaran 70-80. Hingga tahun 2023, laju pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan berada dalam kisaran 0-1 persen, dengan percepatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, IPM tumbuh sebesar 0,41 persen, kemudian pada tahun 2022 meningkat lebih cepat menjadi 0,79 persen, dan pada tahun 2023 tumbuh sebesar 0,87 persen, dengan peningkatan 0,64 poin dibandingkan dengan tahun 2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada disparitas yang signifikan antar wilayah, baik dalam pendapatan per kapita maupun IPM, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan cenderung stabil. Kota Makassar tetap menjadi pusat perekonomian dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB, tetapi beberapa kabupaten, seperti Luwu Timur, juga menunjukkan kontribusi yang signifikan berkat sektor penggalan dan pertambangan.

Secara keseluruhan, meskipun disparitas antar wilayah tetap ada, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan masih menunjukkan hasil yang positif. Untuk mengurangi ketimpangan, dibutuhkan kebijakan yang lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan merata di seluruh wilayah, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan dasar di daerah-daerah tertinggal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amaliyah, S., & Arif, M. (2023). Analisis determinan disparitas distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017-2021. *Primanomics: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(2).
- Asrahmaulyana. (2023). Determinan disparitas antar wilayah dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. *Economics and Digital Business Review*, 4(1).
- Christianingrum, R. (2021). Disparitas pembangunan ekonomi Indonesia. *Jurnal Budget*, 6(2).
- Muhtarom, A. (2017). Disparitas pendapatan regional kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), Juni 2017.
- Nasution, U. K. (2021). Analisis disparitas wilayah di Provinsi Sumatera Utara. (Skripsi). Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.
- Nurhayani, S., Hodijah, S., & Bhakti, A. (2015). Analisis disparitas pembangunan ekonomi dan hubungannya dengan investasi di Provinsi Jambi tahun 2002-2014. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(2), Oktober 2015.
- Putra, R. (2021, July 28). Disparitas antar wilayah merupakan perbedaan. *LinkedIn*. [https://www.linkedin.com/posts/ramapermanaputra\\_disparitas-antar-wilayah-merupakan-perbedaan-activity-6664438441037705216-FTgQ](https://www.linkedin.com/posts/ramapermanaputra_disparitas-antar-wilayah-merupakan-perbedaan-activity-6664438441037705216-FTgQ)
- Safitri, E., Junaidi, & Erfit. (2021). Analisis disparitas pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (segi ekonomi dan non ekonomi). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1), Januari – Maret 2021.
- Soekirno, S. (2002). *Beberapa aspek dalam pembangunan ekonomi daerah*. LPFFE-UI dengan Bima Grafika.
- Sudirman, & Mahadi, N. R. P. (2021). Disparitas pertumbuhan ekonomi antar wilayah kabupaten dan kota. *Jurnal Akuntabel*, 18(1).
- Sulistya, I. E., & Budirahayu, N. (2019). Perencanaan pembangunan perkotaan berbasis ekonomi kreatif dalam rangka pengurangan disparitas regional di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Urban Planning Department - Podomoro University Urban Planning and Property Development Review*, 2(1).